

ANALISIS DAMPAK HUKUM SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

(Studi Kasus Akta Perjanjian Kawin Tertanggal 8 Februari 2021 Nomor 25)

Raymond¹, Dr. Zulfikar Jugde, S.H., Sp.N., M.kn.²

¹Universitas Esa Unggul

²Universitas Esa Unggul

¹ignatiusray94@gmail.com

²zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang berlaku di Republik Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Permohonan mengenai uji materi Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah perjanjian kawin dapat dibuat pasca perkawinan berlangsung dan 2) Bagaimana kedudukan baik harta maupun hutang yang dimiliki bersama. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam lagi dampak pembuatan surat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung terhadap harta dan hutang yang dimiliki dan/atau diperoleh para pihak selama perkawinan berlangsung berdasarkan hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Pembuatan perjanjian perkawinan sekarang tidak wajib dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, akan tetapi dapat dibuat pasca perkawinan. Sehingga baik harta maupun hutang yang dimiliki pasangan dapat dipisahkan dan menjadi hak serta kewajiban masing-masing pihak. 2) Bahwa kedudukan harta milik bersama pasca perjanjian kawin disahkan, dan dengan adanya asas hukum positif yang berarti tidak berlaku surut, maka pemisahan baik harta maupun hutang akan berlaku setelah adanya penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Harta dan Hutang Bersama, Perjanjian Kawin, Pasca Perkawinan.

ANALYSIS OF LEGAL IMPACTS BEFORE AND AFTER THE MAKING OF A POST MARRIAGE MARRIAGE AGREEMENT ON JOINT ASSETS

(Case Study of Marriage Agreement Deed dated February 8, 2021 Number 25)

Raymond¹, Dr. Zulfikar Jugde, S.H., Sp.N., M.kn.²

¹Universitas Esa Unggul

²Universitas Esa Unggul

¹ignatiusray94@gmail.com

²zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The Constitutional Court is one of the state institutions that has independent judicial power to carry out courts in order to enforce law and justice in force in the Republic of Indonesia. Based on the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, the Constitutional Court partially granted the petition regarding judicial review of Article 29 paragraph (1), Article 29 paragraph (3) and Article 29 paragraph (4) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. . The formulation of the problem is as follows: 1) Can a marriage agreement be made after the marriage takes place and 2) What is the position of both assets and debts that are jointly owned. The research method used is normative law with descriptive analysis. Sources of legal materials used by the author in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The purpose of this study is to examine more deeply the impact of making a marriage agreement after the marriage takes place on the assets and debts owned and/or obtained by the parties during the marriage based on positive law that exists and applies in Indonesia. From the results of the research that has been done, it is as follows: 1) Making a marriage agreement now is not required to be made before marriage, but can be made after marriage. So that both assets and debts owned by the spouse can be separated and become the rights and obligations of each party. 2) That the position of joint property after the marriage agreement is ratified, and with the existence of a positive legal principle which means it is not retroactive, then the separation of both assets and debts will take effect after a court decision.

Keywords: Joint Assets and Debt, Marriage Agreement, Post-Marriage.